

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Setiap perusahaan berusaha untuk meningkatkan hasil kinerjanya guna dapat bersaing dalam pasar dan membangun reputasi yang lebih kuat dibandingkan dengan perusahaan lain. Suatu perusahaan yang mengalami peningkatan kinerja harus menerbitkan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan operasional dan posisi keuangan perusahaan tersebut, terutama jika perusahaan tersebut adalah perusahaan yang *go public*. Laporan keuangan dapat memperlihatkan keadaan suatu perusahaan guna meningkatkan kepercayaan bagi investor dan pihak eksternal. Perusahaan akan tetap mengeluarkan laporan keuangan dengan sebaik mungkin sesuai dengan standar yang berlaku untuk tetap mendapat dana dari investor. Laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai sarana informasi yang menghubungkan perusahaan dengan para pemangku kepentingan terkait (Karliana et al., 2015). Pihak yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan termasuk kreditor, investor, dan pemangku kepentingan lain yang menggunakan informasi keuangan, membutuhkan informasi yang objektif dalam laporan keuangan perusahaan.

Dalam meningkatkan kepercayaan investor dan pihak eksternal terhadap suatu perusahaan, maka sangat diperlukan adanya auditor dalam suatu perusahaan, untuk memberikan jasa yang berupa opini untuk menjamin

kewajaran atas laporan keuangan perusahaan. Seorang auditor harus memiliki sikap kompeten dan bertanggungjawab serta memiliki sikap independensi auditor. Auditor perlu mempertahankan sikap independensinya dan menghindari segala hal yang dapat mengurangi independensi tersebut. Dalam mempertahankan kepercayaan sebuah klien maka seorang auditor harus menunjukkan sikap independensinya dan tingkat integritas yang tinggi. Melalui tingkat integritas yang tinggi ini, seorang auditor diharapkan dapat meningkatkan kualitas auditnya tanpa adanya pengaruh dari pihak lain.

Semakin banyaknya jasa akuntan publik yang dibutuhkan maka akan berdampak pada peningkatan persaingan antara KAP dalam memperoleh dan menjaga klien mereka dengan memberikan pelayanan dengan seoptimal mungkin. Kualitas pelayanan dari KAP ini akan mempengaruhi keputusan klien dalam menentukan waktu perikatan kerja di antara mereka. Semakin baik pelayanan dari KAP tersebut, maka klien cenderung akan menggunakan jasa KAP tersebut dalam waktu yang lama. Perusahaan cenderung menuntut auditor dengan melakukan masa perikatan sesuai dengan keinginan perusahaan, namun lamanya masa perikatan yang terjalin ini dapat menciptakan relasi atau koneksi kedekatan hubungan antara auditor dan klien tersebut, ini mampu menyebabkan berkurangnya kualitas dari independensi auditor tersebut. Hubungan yang telah berlangsung lama juga dapat menyebabkan perusahaan seringkali menyalahgunakan laporan keuangan tersebut, dengan menyembunyikan hal ini melalui laporan auditor independen agar terlihat wajar. Untuk menjaga independensi auditor dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap

peran audit dan untuk menjaga objektivitas auditor, perlu dilakukan pergantian auditor (*Auditor Switching*).

Auditor Switching adalah langkah perusahaan dalam melakukan pergantian auditor atau KAP guna menjaga independensi dan kualitas seorang auditor. *Auditor Switching* yang terjadi terbagi menjadi dua cara, dapat terjadi secara *mandatory* (wajib) dan *voluntary* (sukarela). *Auditor Switching* yang terjadi secara *mandatory* (wajib) dilakukan karena sebuah peraturan mengharuskan perusahaan melakukan perubahan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan auditor yang memberikan jasa auditnya kepada perusahaan. *Auditor Switching* yang terjadi secara *voluntary* (sukarela) dilakukan karena atas kehendak dari perusahaan mengganti KAP atau auditor yang menyediakan layanan auditnya kepada perusahaan (Jayanti et al., 2020).

Pergantian auditor yang dilakukan secara *mandatory* yang merupakan kewajiban dari pemerintah. Penerapan peraturan pemerintah mengenai pergantian auditor menjadi salah satu faktor yang memicu pergantian auditor (*Auditor Switching*), peraturan ini menjadi salah satu munculnya perilaku perusahaan dalam mengganti auditornya ataupun KAP. Dalam pergantian auditor (*Auditor Switching*) yang dilakukan perusahaan, KAP dan auditor di Indonesia, maka Pemerintah Indonesia menerbitkan regulasi yang mengatur batasan waktu yang diberikan kepada setiap KAP dan Akuntan Publik dalam menjalankan proses auditnya terhadap suatu perusahaan. Regulasi tersebut tertuang dalam, keputusan Kementerian Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003, kemudian diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia No 17/PMK.01/2008, selanjutnya diganti menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2015 tentang praktik akuntan publik yang mengatur tentang pemberian jasa audit atas informasi keuangan dibatasi paling lama lima tahun buku berturut-turut. Namun pada perusahaan keuangan peraturan lamanya penugasan auditor dan Kantor Akuntan Publik disempurnakan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 13/POJK.03/2017 (Suryandari & Kholipah, 2019). Dalam peraturan tersebut, diatur bahwa institusi keuangan harus membatasi pemanfaatan layanan audit dari akuntan publik selama maksimal tiga tahun secara berturut-turut.

Pergantian auditor secara *voluntary* yang dilakukan oleh sebuah perusahaan maka perusahaan tersebut mungkin sedang dalam tidak kondisi normal atau terjadinya beberapa masalah yang menyebabkan pergantian auditor dilakukan secara sukarela. Terjadinya *auditor switching* secara *voluntary* dalam suatu perusahaan menimbulkan terjadinya kecurigaan dari para pemakai laporan keuangan dan pihak eksternal lainnya. Dikarenakan, terjadinya pergantian auditor ini diluar dari aturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching* tersebut. *Auditor Switching* dapat memberikan kepercayaan kepada investor terhadap perusahaan tersebut. Karena investor memiliki jaminan atas kualitas informasi laporan keuangan dari hasil audit yang telah dikerjakan. Kepercayaan investor kepada perusahaan yang memiliki *auditor switching* akan berasumsi bahwa perusahaan tersebut menjaga independensi dari auditor yang mengaudit perusahaan

tersebut. Dengan begitu, investor dapat membangun tingkat kepercayaan terhadap kualitas dari laporan audit yang ada.

Fenomena pergantian auditor (*auditor switching*) di Indonesia masih marak dilakukan. Salah satu contoh kasus *auditor switching* yang dialami pada sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi adalah salah satunya adalah kasus dari PT Garuda Indonesia. Menurut sumber kemenkeu.go.id pada tahun 2018 laporan keuangan tahunan ditemukan bermasalah dikarenakan Garuda Indonesia mengakui pendapatan terkait kerjasama yang dilakukan oleh PT Mahata Aero Teknologi atas pembayaran yang akan di terima Garuda Indonesia sehingga hal tersebut berpengaruh kepada laba rugi Garuda Indonesia sehingga Garuda Indonesia terlihat memperoleh kenaikan laba bersih yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Karena ditemukan kejadian tersebut maka pada tahun 2019 Kementerian Keuangan mengumumkan sanksi yang dijatuhkan pada KAP yang mengaudit PT Garuda Indonesia yaitu Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (KAP BDO).

Sanksi yang diberikan yaitu pembekuan izin selama 12 bulan terhadap Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan memberikan peringatan tertulis dengan disertai kewajiban memperbaiki sistem pengendalian mutu KAP pada Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan. PT Garuda Indonesia juga mendapatkan sanksi administratif dengan denda masing – masing sebesar Rp. 100.000.000,- kepada seluruh anggota direksi dan dewan komisaris yang menandatangani laporan tahunan PT Garuda Indonesia Tbk

tahun buku 2018. Kasus tersebut yang menyebabkan PT Garuda Indonesia harus mengganti auditornya di tahun 2019 menjadi Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan Daniel Kohar yang bereputasi baik dalam melakukan pemeriksaan serta masuk jajaran *Big four* yaitu afiliasi KAP PWC di Indonesia.

Fenomena terjadi di perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi terkait *auditor switching* yaitu PT Bakrie Telecom Tbk. Berdasarkan data yang dilansir oleh cnbcindonesia.com PT Bakrie Telecom yang sedang berjalan di sektor telekomunikasi dengan kode IDX (BTEL), Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan emiten telekomunikasi asuhan Grup Bakrie, PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL). Alasannya karena adanya ketidaksesuaian kenyataan dengan di lapangan sehingga akuntan yang memeriksa laporan keuangannya tersebut memberikan opini Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*) selama dua tahun berturut-turut yaitu untuk laporan tahun 2017-2018. Opini *disclaimer* diberikan KAP ketika KAP merasa bahwa ruang lingkup pemeriksaannya dibatasi sehingga auditor tidak melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar audit yang berlaku. Selain itu, alasan lainnya termasuk meragukan nilai yang disajikan pada laporan keuangan, perusahaan sedang menjalani kasus hukum, atau auditor tidak yakin atas keberlangsungan bisnis perusahaan di masa mendatang. Sehingga pada tahun 2019, PT Bakrie Telecom Indonesia melakukan *auditor switching* secara *voluntary*.

Fenomena lain terkait *auditor switching* pada sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yaitu PT Northcliff Indonesia. Berdasarkan investasi.kontan.co.id PT Skybee Tbk resmi berganti nama pada pencatatan di BEI menjadi PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk. Perubahan nama tersebut telah mendapat persetujuan dari tahun 2019. Terdapat perubahan susunan direksi pada rencana rapat umum pemegang saham. Selain itu, dalam rapat tersebut juga salah satunya akan membahas pergantian auditor untuk tahun 2019. Diharapkan KAP dan auditor yang baru dapat beradaptasi dengan manajemen dari perusahaan tersebut. Selain itu, PT Northcliff Indonesia pada tahun 2019 tidak mem-*publish* laporan keuangan tahunan perusahaan di Bursa Efek Indonesia hingga batas pelaporannya. sehingga PT Northcliff Indonesia diberhentikan sementara dalam mendagangkan efeknya di BEI. Penyebab ini yang mengakibatkan PT Northcliff Indonesia mengganti auditornya. Sampai tahun 2022 laporan tahunan 2019 perusahaan tersebut tidak di-*publish* sehingga perusahaan tersebut dalam potensi *delisting* atau dihapus dalam perdagangan saham (Ramadan et al., 2022).

Dalam penelitian sebelumnya yang telah peneliti kumpulkan, terdapat beberapa faktor yang dikemukakan sebagai penyebab dari *auditor switching* seperti *financial distress*, ukuran KAP, ukuran perusahaan, opini audit, audit *report lag*, audit *tenure*, audit *fee*, komite audit, pergantian manajemen, pertumbuhan perusahaan, audit *delay*, dan opini *going concern* Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh variabel ukuran KAP, *financial distress*, audit *fee*, pergantian manajemen, dan *background* komite

audit terhadap fenomena *auditor switching*. Namun, perlu dicatat bahwa dalam literatur sebelumnya masih terdapat perbedaan pandangan mengenai pengaruh masing-masing variabel ini.

Penelitian sebelumnya mengungkapkan hasil yang tidak konsisten mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pergantian auditor atau KAP. Dalam kaitannya dengan ukuran KAP, ada dua klasifikasi, yaitu Ukuran KAP besar dan Ukuran KAP kecil. Perusahaan lebih cenderung melakukan pergantian auditor ke KAP yang lebih besar dengan tujuan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan memperoleh kepercayaan lebih dari investor. Namun, kemungkinan perusahaan untuk beralih ke KAP yang lebih kecil sangat kecil karena ada kekhawatiran bahwa KAP tersebut mungkin tidak dapat memberikan audit yang berkualitas tinggi atau meningkatkan reputasi perusahaan (Adolpino Nainggolan et al., 2022). Pada penelitian yang dilakukan oleh Widya Pratama & Sudiyatno (2022), Megaria Duma (2021), Ruroh & Rahmawati (2016) menyatakan bahwa ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*, yang dalam jurnalnya mengatakan bahwa perusahaan yang menggunakan jasa KAP yang memiliki reputasi yang besar berkemungkinan kecil dalam melakukan *auditor switching*. Sedangkan menurut penelitian Muaqilah et al., (2021), Adolpino Nainggolan et al., (2022), Ermian Challen & Wardana (2019) menyatakan bahwa ukuran KAP memiliki pengaruh positif terhadap *auditor switching*. Bertolak belakang terhadap penelitian yang dilakukan oleh Zikra & Syofyan (2019), Lesmana & Kurnia (2016), As'ad & Nofryanti (2021), Arsih & Anisykurillah (2015) menyatakan bahwa ukuran

KAP tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Menurut (Maemunah & Nofryanti, 2019) ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *auditor switching* dikarenakan besar kecilnya ukuran KAP tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur suatu perusahaan untuk melakukan pergantian auditor (*Auditor Switching*).

Menurut (Nainggolan et al., 2022) *financial distress* merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya *auditor switching* terhadap perusahaan. Karena penurunan keuangan perusahaan cenderung menyebabkan perusahaan akan berganti ke KAP yang memiliki *fee* lebih rendah dari yang sebelumnya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Megaria Duma (2021), (Elva Marisa N et al., 2022), (Mirasanti & Kartika, 2022) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. *Financial distress* yang semakin tinggi akan mengakibatkan pergantian auditor yang semakin tinggi, dikarenakan perusahaan akan mencari auditor yang lebih independent dalam mengaudit perusahaan tersebut. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Ermian Challen & Wardana, 2019), Yusriwati (2019), (Dewi & Muliati, 2021) *financial distress* memiliki pengaruh negatif terhadap *auditor switching*. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh (Holdi & Tarmizi, 2022), (Lesmana & Kurnia, 2016), (Widya Pratama & Sudiyatno, 2022), (Tjahjono & Khairunissa, 2021) menyatakan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan kemungkinan tidak melakukan *auditor switching* disebabkan biaya start up yang

tinggi apabila perusahaan mengganti KAP, sedangkan kondisi perusahaan sedang tidak stabil.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi *auditor switching* adalah *audit fee*. *Fee* audit yang ditetapkan terlalu tinggi maka perusahaan akan melakukan *auditor switching*. Apabila perusahaan dengan KAP tidak menghasilkan kesepakatan mengenai besaran *fee* audit, maka perusahaan akan berpindah kepada KAP dengan *fee* audit yang lebih kecil terlebih lagi kualitas yang didapat jauh lebih bagus (Nainggolan et al., 2022). Pada penelitian yang dilakukan oleh Aulia Najwa & Syofyan (2020), Luh & Desy (2018), (Nainggolan et al., 2022) *audit fee* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Jika *audit fee* yang ditawarkan oleh auditor semakin tinggi bagi perusahaan, maka perusahaan akan melakukan pergantian auditor ke akuntan publik yang memiliki *audit fee* yang lebih sesuai dengan kondisi perusahaan. Sedangkan menurut Elva Marisa N et al., (2022), Mulya & Akt (2017), Oktaviani et al., (2016) menyatakan bahwa *audit fee* berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*. Bertolak belakang pada penelitian yang dilakukan oleh Anjelina (2022), (Muslimah & Pohan, 2022), (Elizabeth et al., 2016), (Maidani & Afriani, 2019), Anisa & Christy (2020) menyatakan bahwa *audit fee* tidak mempengaruhi terhadap *auditor switching*. Menurut (Elizabeth et al., 2016) *audit fee* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching* dikarenakan jika *audit fee* yang dikenakan Kantor Akuntan Publik tinggi tetapi dengan hasil opini audit yang sesuai dengan kemauan pihak perusahaan maka perusahaan tidak akan mempermasalahkan *fee* audit yang mereka keluarkan.

Salah satu penyebab perusahaan melakukan pergantian auditor adalah ketika terjadi perubahan dalam manajemen, yang mungkin menghasilkan ketidaksepakatan antara perusahaan dan auditor atau KAP terkait isu akuntansi tertentu. Hal ini dapat dipicu oleh adanya perubahan manajemen di perusahaan tersebut. Peningkatan pergantian manajemen diikuti juga dengan peningkatan pergantian auditor atau KAP (Rahmitasari & Syarief, 2021). Pada penelitian Ilhamsyah et al., (2020b), Aprilia & Effendi (2019), Pratiwi & Kustina, (2018) menyatakan bahwa pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Perusahaan yang melakukan pergantian manajemen, kemungkinan terjadinya *auditor switching* semakin besar, dikarenakan manajemen yang baru akan mencari auditor yang sesuai dengan kriteria manajemen baru tersebut. Sedangkan dalam penelitian Nur Azizah dan Kim Budiwinarto, (2019), Ermian Challen et al., (2021) pergantian manajemen berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*. Pada penelitian yang dilakukan oleh Faradila & Yahya, (2016), Amrizal dan Amelia, (2016), Mauliddina et al., (2017), Kusumaningrum & Mulya (2018) menyatakan bahwa pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Menurut (Antoni et al., 2018) pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap *auditor switching* dikarenakan kebijakan yang berubah merupakan kebijakan perusahaan bukan kebijakan akuntansi, namun untuk kebijakan akuntansi telah diatur dalam PSAK sehingga tidak memungkinkan terjadinya pergantian auditor terhadap perusahaan tersebut. Terlebih lagi dengan perusahaan yang memakai KAP Big Four, *auditor switching* jarang dilakukan karena kualitas audit dari KAP Big Four

memiliki kekuatan monitoring dan independensi yang tinggi. Manajemen yang baru hanya perlu melakukan penyesuaian terhadap kebijakan-kebijakan perusahaan sehingga tidak harus untuk mengganti KAP.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi *auditor switching* yaitu *background* komite audit. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Artawijaya & Putri, 2016) menyatakan bahwa *background* komite audit berpengaruh negatif terhadap *auditor switching* dikarenakan jika semakin banyak anggota komite audit yang berlatar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan, maka semakin efektif proses pengawasan terhadap laporan keuangan yang dilakukan oleh komite audit, sehingga pergantian auditor akibat opini audit yang tidak sesuai dapat dicegah. Sedangkan dalam penelitian Baskara Putratama Arta et al., (2021) *background* komite audit berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Semakin banyaknya anggota komite audit yang berlatar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan, maka semakin tinggi pergantian auditor dikarenakan pengawasan yang dilakukan komite audit semakin efektif dan meningkat, sehingga memerlukan auditor baru yang lebih independen bagi perusahaan. Bertolak belakang pada penelitian yang dilakukan oleh Fenadi (2019), Arkaputra & Hidayah (2022) menyatakan bahwa *background* komite audit tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Menurut Mardasari & Triyanto (2020a) komite audit tidak berpengaruh terhadap *auditor switching* dikarenakan semakin banyak latar belakang pendidikan akuntansi dari anggota komite audit tidak mempengaruhi untuk dilakukannya *auditor switching*.

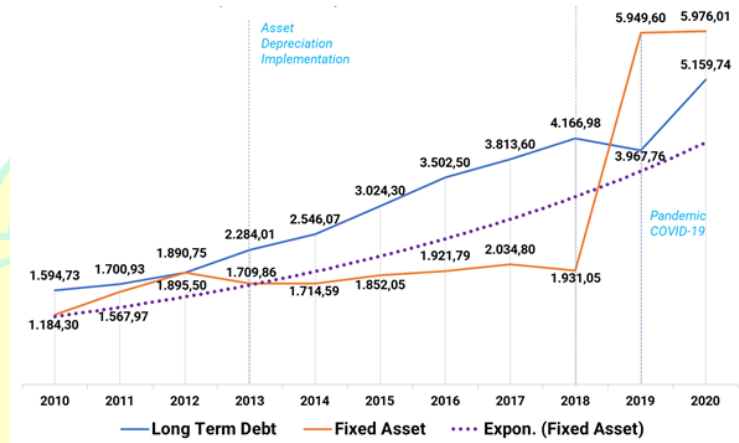
Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Pada Kuartal III-2022 pertumbuhan ekonomi di Indonesia mencapai angka 5,72%. Indonesia menjadi lebih unggul dari negara-negara lain seperti Meksiko, China, Singapura, Spanyol, Korea Selatan dll. cnbcindonesia.com. Di tahun ini, pertumbuhan Indonesia diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kenaikan ini dipicu karena kebijakan pemerintah yang ingin mendorong hilirisasi sumber daya alam. Selain itu, peran Indonesia sebagai Ketua ASEAN juga menjadi salah satu penyebab pertumbuhan di Indonesia (kompas.id). Oleh karena itu, Indonesia masih berfokus pada peningkatan perkembangan ekonomi untuk kemakmuran negara dan masyarakat di dalamnya. Salah satu peningkatan perekonomian di Indonesia yaitu dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur menjadi penopang peradaban suatu bangsa. Pembangunan infrastruktur sangat penting terlebih lagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan kekhasan kondisi geografis di dalamnya. Karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan konektivitas antar kawasan serta berupaya melakukan pemerataan dengan memprioritaskan pembangunan di daerah dan desa (kemenkeu.go.id).

Pembangunan ini ditandai dengan peningkatan perkembangan jalan tol di Indonesia. Berdasarkan sumber kompasiana.com tercatat sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2022, pemerintah Indonesia telah berhasil menambah 511,11 km jalan tol baru. Menurut Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), di tahun 2023 pemerintah memiliki target 509,01

km jalan tol yang akan beroperasi. Sedangkan di tahun 2024 akan diprediksi 385,5 km yang akan beroperasi. Selain pembangunan jalan tol, dalam meningkatkan infrastruktur di Indonesia, pemerintah membangun Trans Papua dan Trans Kalimantan. Dengan adanya pembangunan di jalan ini, maka dapat memudahkan akses untuk ke Papua dan Kalimantan. Pembangunan jalan trans Papua dan trans Kalimantan ini juga bertujuan agar perekonomian warga setempat dapat tumbuh dan berkembang serta menarik investor untuk dapat ikut serta membangun daerah tersebut (kumparan.com). Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintah di tahun 2023. Pemerintah memiliki dua prioritas dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia yaitu, mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur prioritas nasional dan mendorong pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemerintah gencar dalam peningkatan konektivitas antarkawasan serta berupaya melakukan pemerataan dengan memprioritaskan pembangunan di daerah dan desa (pu.go.id). Pembangunan infrastruktur secara masif dan merata di Indonesia selama lima tahun terakhir akan menjadi pondasi untuk kemajuan Indonesia yang akan mendatang.

Dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, lebih dari 90% utang pemerintah didominasi dengan utang jangka panjang. Dalam hal ini, maka utang yang dipakai memang diproyeksikan untuk program yang manfaatnya untuk waktu yang jangka panjang. Program yang biasanya termasuk dalam utang jangka Panjang yaitu perlindungan sosial dan pembangunan infrastruktur. Dalam pembangunan infrastruktur dapat dilihat tren pertumbuhan utang dan

asset tetap yang tercatat dalam LKPP untuk dapat mengetahui seberapa besar utang yang ada dalam pertumbuhan asset tetap.



Gambar 1. 1 Tren Utang Jangka Panjang dan Nilai Aset Tetap Pembangunan Infrastruktur

Sumber : LKPP 2010-2020

Berdasarkan gambar di atas, menjelaskan bahwa tren kenaikan utang pada tahun 2010-2018 utang jangka panjang menunjukkan kenaikan yang signifikan setiap tahunnya, seiring dengan kebijakan pemerintah dalam melakukan ekspansi fiskal dan meletakkan pondasi pertumbuhan dan pembangunan infrastruktur di dalamnya. Berbeda dengan tren utang di tahun 2019-2020 yang mengalami penurunan di tahun 2019 dan naik lagi di tahun 2020. Hal ini dipengaruhi dengan adanya Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia di tahun tersebut. Di sisi lain, tren nilai aset juga mengalami pergerakan, namun nilai yang tercatat pada LKPP tahun 2010-2018 masih menggunakan nilai valuasi tahun 2007-2009 atau nilai perolehan. Pada tahun 2018-2020 pemerintah melakukan program revaluasi aset tetap untuk tanah dan bangunan. Melalui program ini, nilai aset tetap yang tercatat menjadi lebih wajar dan

mutakhir sehingga dari aspek nilai menjadi lebih *comparable* dengan nilai utang pemerintah. Secara kasar, rasio antara aset tetap dan utang pada tahun 2020 mencapai 1,15. Rasio ini berarti setiap satu rupiah utang didukung oleh atau berkorelasi dengan kurang lebih satu rupiah aset tetap (kemenkeu.go.id).

Sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi merupakan salah satu sektor jasa yang ada di Indonesia. Sektor ini merupakan salah satu sektor yang sangat penting bagi pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Perkembangan dari infrastruktur yang ada di sebuah negara dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang ada. Jika terdapat kekurangan, maka dapat menghambat pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Dengan tersedianya infrastruktur di suatu negara dalam jumlah yang memadai maka negara tersebut dapat tergolong ke dalam negara maju. Ketersediaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang memadai dapat mendukung tercapainya pembangunan ekonomi yang produktif, begitu juga sebaliknya jika infrastruktur, utilitas, dan transportasi kurang memadai maka akan menghambat pembangunan ekonomi negara tersebut (Anggadi & Triyanto, 2022). Ketersediaan infrastruktur dapat menjadi modal Indonesia meningkat menjadi negara maju dan tidak terperangkap sebagai negara berkembang saja atau "*middle income trap*". Menurut Presiden Joko Widodo, infrastruktur merupakan pondasi bagi Indonesia untuk mampu berkompetisi dengan negara lain (kiprah.pu.go.id). Dengan adanya pembangunan infrastruktur, maka akan membangun akses baru dan mempermudah akses yang sudah ada.

Proses pembangunan yang dilakukan tentunya membutuhkan dukungan dari pihak swasta di Indonesia, adanya keterbatasan modal yang dimiliki pemerintah dalam mencari dan mengolah sumber daya alam Indonesia sehingga memerlukan dukungan dari pihak swasta (Aghnia Muthi'a & Budiantoro, 2020). Dengan adanya dukungan dari pihak swasta maka dapat mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia, sehingga perlu adanya dorongan perkembangan *spirit* pemerintahan *marketer* dalam memfasilitasi integrasi pemerintah dan perusahaan swasta melalui skema *public-private partnership* mulai dari perencanaan program sampai penyediaan infrastruktur.

Dalam terlaksananya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, maka pemerintah, swasta, serta masyarakat perannya sangat dibutuhkan demi tercapainya tujuan yang sudah direncanakan. Tercapainya visi dan misi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, menjadi salah satu hal yang penting dalam pembangunan nasional. Dalam proses pembangunan ini, maka dibutuhkan dana dalam jumlah banyak agar pembangunan ini terlaksana dengan cepat dan dapat selesai sesuai dengan target yang sudah ditentukan sebelumnya. Salah satu peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur ini adalah pengalokasian anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Di bawah ini merupakan data anggaran infrastruktur dari tahun 2014 – 2022.

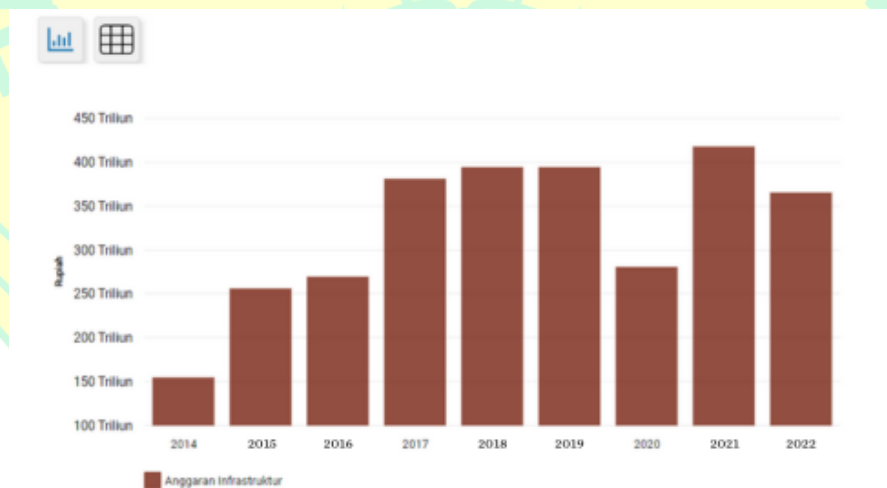
Berdasarkan gambar 1.1 mengenai anggaran infrastruktur dalam sembilan tahun terakhir menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam kenaikan dan penurunan angka. Dari tahun 2014-2019 mengalami peningkatan yang signifikan di bidang infrastruktur. Yang berarti bahwa peningkatan tersebut

menunjukkan pembangunan sektor infrastruktur terus dilakukan pemerintah setiap tahunnya. Namun, karena efek dari adanya Pandemi Covid-19 maka di tahun 2020 anggaran infrastruktur tersebut mengalami penurunan yang signifikan, yaitu sekitar 16% dibanding tahun 2019. Namun, mengalami pemulihan, dengan kenaikan pesat di tahun 2021 yaitu sebesar 19%. Di tahun 2021, merupakan anggaran terbesar dalam sembilan tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa, di tahun 2020 mengalami penurunan pembangunan pada sektor infrastruktur dikarenakan terhalang karena Pandemi Covid-19 yang menghambat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Namun dapat kembali pulih dengan meningkat pesat di tahun 2021.

Di tahun 2022 mengalami penurunan sekitar 14%, ini menunjukkan bahwa dalam proses pembangunan infrastruktur di tahun 2022 masih terdapat hambatan yang menyebabkan anggaran untuk infrastruktur di Indonesia. Terjadinya kenaikan dari anggaran infrastruktur tersebut dapat mempercepat proses pembangunan infrastruktur yang targetnya sudah ditentukan dan untuk memperkuat pondasi pembangunan yang berkualitas. Walaupun pada Pandemi Covid-19 mengalami penurunan, namun Indonesia dapat bangkit untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia. Semakin banyaknya anggaran yang di keluarkan pemerintah dalam sektor ini, maka sudah banyak infrastruktur yang telah dibangun dalam pencapaiannya. Dalam gambar tersebut, alokasi anggaran untuk infrastruktur sebagian besar digunakan untuk membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat dalam mempermudah aktivitas masyarakat sehari-hari seperti

transportasi, telekomunikasi informasi, mobilitas barang dan jasa seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan, jalur kereta api dll.

Infrastruktur ini merupakan kunci untuk pertumbuhan berkelanjutan di Indonesia. Dengan adanya pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat membantu segala akses yang mempermudah kehidupan masyarakat. Semakin banyaknya anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah maka akan semakin cepat proses dari pembangunan infrastruktur yang merupakan salah satu kontribusi terbesar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini. Oleh karena itu, peneliti menggunakan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi karena sektor ini merupakan sektor unggulan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Proses pembangunan ekonomi yang produktif tidak akan mungkin tercapai jika tidak didukung dengan ketersediaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang memadai.



Gambar 1. 2 Anggaran Infrastruktur tahun 2014-2022

Sumber : <http://www.databoks.katadata.co.id>

Berdasarkan gambar 1.1 mengenai anggaran infrastruktur dalam sembilan tahun terakhir menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam kenaikan dan penurunan angka. Dari tahun 2014-2019 mengalami peningkatan yang signifikan di bidang infrastruktur. Yang berarti bahwa peningkatan tersebut menunjukkan pembangunan sektor infrastruktur terus dilakukan pemerintah setiap tahunnya. Namun, karena efek dari adanya Pandemi Covid-19 maka di tahun 2020 anggaran infrastruktur tersebut mengalami penurunan yang signifikan, yaitu sekitar 16% dibanding tahun 2019. Namun, mengalami pemulihan, dengan kenaikan pesat di tahun 2021 yaitu sebesar 19%. Di tahun 2021, merupakan anggaran terbesar dalam sembilan tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa, di tahun 2020 mengalami penurunan pembangunan pada sektor infrastruktur dikarenakan terhalang karena Pandemi Covid-19 yang menghambat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Namun dapat kembali pulih dengan meningkat pesat di tahun 2021.

Di tahun 2022 mengalami penurunan sekitar 14%, ini menunjukkan bahwa dalam proses pembangunan infrastruktur di tahun 2022 masih terdapat hambatan yang menyebabkan anggaran untuk infrastruktur di Indonesia. Terjadinya kenaikan dari anggaran infrastruktur tersebut dapat mempercepat proses pembangunan infrastruktur yang targetnya sudah ditentukan dan untuk memperkuat pondasi pembangunan yang berkualitas. Walaupun pada Pandemi Covid-19 mengalami penurunan, namun Indonesia dapat bangkit untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia. Semakin banyaknya anggaran yang di keluarkan pemerintah dalam sektor ini,

maka sudah banyak infrastruktur yang telah dibangun dalam pencapaiannya. Dalam gambar tersebut, alokasi anggaran untuk infrastruktur sebagian besar digunakan untuk membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat dalam mempermudah aktivitas masyarakat sehari-hari seperti transportasi, telekomunikasi informasi, mobilitas barang dan jasa seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan, jalur kereta api dll.

Infrastruktur ini merupakan kunci untuk pertumbuhan berkelanjutan di Indonesia. Dengan adanya pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat membantu segala akses yang mempermudah kehidupan masyarakat. Semakin banyaknya anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah maka akan semakin cepat proses dari pembangunan infrastruktur yang merupakan salah satu kontribusi terbesar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini. Oleh karena itu, peneliti menggunakan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi karena sektor ini merupakan sektor unggulan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Proses pembangunan ekonomi yang produktif tidak akan mungkin tercapai jika tidak didukung dengan ketersediaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang memadai.

Berdasarkan hasil para penelitian terdahulu masih banyak hasil yang belum konsisten terhadap *auditor switching*. Masih ditemukannya *research gap* mengenai adanya perbedaan hasil dari faktor yang menyebabkan *auditor switching*. Penelitian ini merupakan modifikasi yang dilakukan oleh peneliti dari penelitian terdahulu. Peneliti juga mempertimbangkan masih belum banyaknya penelitian terkait *auditor switching* yang menggunakan perusahaan

pada sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi di Indonesia dengan tahun penelitian 2020 – 2022. Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti tertarik dan bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Ukuran KAP, *Financial Distress*, *Audit Fee*, Pergantian Manajemen, dan *Background* Komite Audit Terhadap *Auditor Switching*”.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, peneliti menemukan *research gap* berupa kontradiksi hasil penelitian terdahulu terkait dengan pengaruh ukuran KAP, *financial distress*, *audit fee*, pergantian manajemen, dan *background* komite audit terhadap *auditor switching*. Oleh karena itu, penulis membuat rumus pertanyaan penelitian yaitu :

1. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap *auditor switching* pada laporan keuangan perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi di Indonesia?
2. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching* pada laporan keuangan perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi di Indonesia?
3. Apakah *audit fee* berpengaruh terhadap *auditor switching* pada laporan keuangan perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi di Indonesia?
4. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching* pada laporan keuangan perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi di Indonesia?

5. Apakah *background* komite audit berpengaruh terhadap *auditor switching* pada laporan keuangan perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran KAP terhadap *auditor switching* pada laporan keuangan perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap *auditor switching* pada laporan keuangan perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh audit *fee* terhadap *auditor switching* pada laporan keuangan perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh pergantian manajemen terhadap *auditor switching* pada laporan keuangan perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi di Indonesia.
5. Untuk mengetahui pengaruh *background* komite audit terhadap *auditor switching* pada laporan keuangan perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, diharapkan dalam penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap teori agensi untuk beragam aspek penelitian mengenai topik serupa di masa mendatang. Teori agensi memiliki kepentingan yang berbeda antara *principal* dan *agent*, yang di mana seiring dengan berjalannya waktu *principal* dan *agent* akan menimbulkan konflik. Konflik ini disebabkan karena adanya asimetri informasi antara *principal* dan *agent*. Asimetri informasi ini disebabkan karena distribusi informasi yang tidak sesuai. Adanya konflik tersebut, diperlukan pihak ketiga sebagai mediator atau menjembatani permasalahan antara *principal* dan *agent*, yaitu auditor independen. Auditor independen berperan sebagai penengah kedua belah pihak, yang melakukan proses pemantuan dan pemeriksaan terhadap aktivitas yang dilakukan pihak-pihak yang berkepentingan tersebut. Namun, auditor independen perlu menjaga sikap independensinya agar informasi yang dihasilkan dapat dipercaya oleh publik yaitu dengan melakukan *auditor switching*. Penelitian ini dimaksudkan mampu menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara teori agensi dengan *auditor switching*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain adalah:

- a. Bagi Kantor Akuntan Publik dan auditor eksternal, penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching* pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi di Indonesia seperti ukuran KAP, *financial distress*, *audit fee*, pergantian manajemen, dan *background* komite audit.
- b. Bagi perusahaan, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi perusahaan agar terus meningkatkan kinerja perusahaan agar dapat tercapai tujuan dari perusahaan.

